

## **BAB V**

### **SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI**

#### **5.1. Simpulan**

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV terkait penelitian mengenai penguatan gerakan filantropi untuk mengembangkan dimensi sosio-kultural kewarganegaraan sesuai dengan pertanyaan penelitian, kesimpulan penelitian sebagai berikut.

1. Konstruksi filantropi Indonesia dalam membangun dimensi sosiokultural kewarganegaraan secara praktik dipengaruhi oleh tradisi lokal dan keagamaan yang mengarah pada kesadaran kolektif warga negara pada masyarakat dengan solidaritas mekanis. Kesadaran kolektif pada pemahaman Durkheim yang menjadi ciri solidaritas mekanis, pada kasus filantropi di Indonesia berada pada irisan solidaritas mekanis dan organis. Menguatnya kedermawanan dapat dijelaskan dari teori fakta sosial bahwa ada fakta sosial nonmaterial yang membentuk semangat gerakan filantropi masyarakat Indonesia yakni kedermawanan dan kesadaran kolektif yang menjadi ciri dari solidaritas mekanis di pedesaan yang terjadi pada masyarakat modern dengan solidaritas organis. Kesadaran kolektif ini berasal dari luar dirinya yang diinternalisasi dalam wujud aturan agama, nilai, dan moral yang menjadi acuan dalam bertindak.
2. Pola hubungan antara warga negara, filantropi, dan negara dalam membangun sosiokultural kewarganegaraan karena adanya kesadaran filantropi yang muncul karena ada eksistensi sosiokultural warga negara melalui gerakan filantropi. Ada peran yang bisa dimainkan oleh warga negara dalam rangka mengejawantahkan eksistensi dirinya atau peran-peran dirinya sebagai warga negara. Hubungan antara warga negara, negara dan filantropi ini memungkinkan peluang untuk munculnya gerakan kerelawanan melalui filantropi ketika negara memang tidak menunjukkan kemampuan yang baik untuk mendorong kesejahteraan masyarakat, artinya masyarakat mencoba menjadi pelengkap dari kebijakan negara yang belum tuntas. Kesadaran filantropi warga negara mengalami fluktuasi. Pada perkembangannya ada

peningkatan kesadaran tentang kemandirian juga perkembangan yang mengarah pada pemikiran dan praktik tentang filantropi inklusif. Momentum pandemi menguatkan kesadaran yang harus dijaga walaupun tidak berharap momentum pandemi, namun biasanya dari bencana membawa potensi lebih inklusif. Titik temu komplementer ini diawali dengan sinergi antara warga negara, negara, dan filantropi karena bagaimana pun pemerintah setidaknya harus fokus pada kebutuhan dasar masyarakat, sementara lembaga filantropi di luar negara fokus pada pemberdayaan bidang lain seperti advokasi. Pemenuhan kebutuhan dasar adalah tugas utama pemerintah sementara itu filantropi bisa diarahkan untuk pemberdayaan dan penguatan kewarganegaraan dan ke arah demokratisasi berkeadilan sosial.

3. Faktor-faktor determinatif terhadap pengembangan gerakan filantropi di Indonesia dalam membangun dimensi sosio-kultural kewarganegaraan yakni
  - a. Faktor kedermawanan masyarakat Indonesia merupakan bagian dari faktor yang determinatif bagi gerakan filantropi di Indonesia. Tradisi gotong royong sangat mengakar dalam kehidupan keseharian masyarakat Indonesia yang menjadi fakta menarik masyarakat Indonesia di tengah pandemi karena semangat membantu mengalami peningkatan luar biasa. Di tengah keterbatasan ekonomi dan kondisi sulit yang terjadi saat ini malah meningkatkan gairah masyarakat untuk gotong-royong membantu sesama. Perubahan hanya pada jumlah dan bentuk bantuannya saja. Faktor agama dan tradisi masyarakat menjadi penentu semangat kedermawanan ini menjadi fakta sosial masyarakat Indonesia dalam filantropi.
  - b. Digitalisasi sebagai transformasi filantropi memberikan pengaruh kedermawanan masyarakat Indonesia. Saat ini sudah mulai bisa mentransformasikan kegiatan filantropi konvensional ke arah digital yang mengubah pola menyumbang melalui digital *payment* yang menyebabkan kegiatan filantropi masih marak, orang tetap bisa apa berkampanye menggalang dukungan dan masyarakat bersedia untuk menyumbang meskipun berbeda dengan dulu. Berderma secara daring dan *crowdfunding* telah membuat berderma dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Manusia punya kecenderungan dan keinginan untuk terlibat secara sosial

bisa menjadi bagian dari sebuah gerakan kebaikan, maka hal tersebut kekuatan filantropi masa depan untuk punya peran dan potensi yang cukup bagus untuk menggerakkan dan merekatkan kembali masyarakat.

- c. Fenomena kecenderungan tersekatnya masyarakat karena polarisasinya cukup kuat ternyata berdampak pada filantropi. Polarisasi masyarakat ini setidaknya dilihat dari dua perspektif polarisasi, yakni polarisasi keagamaan dan polarisasi pilihan politik. Pegiat filantropi mulai gelisah dengan adanya polarisasi ini dan persepsi keagamaan yang keliru serta fanatisme yang terlalu kuat padahal filantropi dinilai potensial untuk mengatasi masalah dengan cinta kasih. Hal ini menjadi ganjalan dalam melakukan kegiatan filantropi.
- d. Regulasi untuk pengelolaan dana publik belum jelas. Siapa saja yang berhak menarik dana-dana dari masyarakat meskipun itu adalah sumbangan. Pemerintah juga dapat mengendalikan masyarakat sipil, dan filantropi, melalui birokrasi dan peraturan, yang mungkin atau mungkin tidak dimaksudkan bersifat membatasi. Adakalanya kurangnya regulasi itu sendiri bisa menjadi masalah. Keterlanaan dengan aktivitas karitatif yang jangka pendek serta sekadar formalitas yang hanya menyelesaikan gejalanya saja.
- e. Belum adanya infrastruktur kelembagaan dan kebijakan dari pemangku kepentingan mendorong perlu adanya usaha yang efektif dan terarah dari berbagai komponen pelaku dan pendukung filantropi di Indonesia untuk menghimpun, menyatukan dan memperkuat gerak langkah bersama masyarakat sipil dalam menghadapi tantangan pembangunan sosial, kemanusiaan dan lingkungan di negeri ini.

## **5.2. Implikasi**

Dari pembahasan hasil penelitian, pembahasan, dan temuan yang telah disusun terdapat sejumlah implikasi penelitian sebagai berikut.

1. Konstruksi filantropi Indonesia dalam membangun dimensi sosio-kultural kewarganegaraan secara praktik dipengaruhi oleh tradisi lokal dan keagamaan yang mengarah pada kesadaran kolektif warga negara pada masyarakat dengan solidaritas mekanis. Kesadaran kolektif pada pemahaman Durkheim yang menjadi ciri solidaritas mekanis, pada kasus filantropi di Indonesia berada pada

irisan solidaritas mekanis dan organis. Hal ini berimplikasi pada gerakan filantropi dengan basis tradisi kultural dan keagamaan yang kuat di Indonesia mampu untuk memperkuat dimensi sosiokultural kewarganegaraan yang berbicara mengenai kewarganegaraan sebagai praktik dengan mengacu pada kesadaran diri sebagai individu yang hidup dalam hubungan dengan orang lain, berpartisipasi secara bebas dalam masyarakat dan bergabung dengan orang lain untuk tujuan politik, sosial, budaya atau ekonomi.

2. Kesadaran filantropi muncul karena ada eksistensi sosiokultural warga negara melalui gerakan filantropi. Ada peran yang bisa dimainkan oleh warga negara dalam rangka mengejawantahkan eksistensi dirinya atau peran-peran dirinya sebagai warga negara. Implikasinya adalah bahwa hubungan antara warga negara, negara dan filantropi ini memungkinkan peluang untuk munculnya gerakan kerelawanan melalui filantropi ketika negara memang tidak menunjukkan kemampuan yang baik untuk mendorong kesejahteraan masyarakat, artinya masyarakat mencoba menjadi pelengkap dari kebijakan negara yang belum tuntas. Keberadaan warga negara sebagai pelengkap pemerintah melalui filantropi menunjukkan perannya dalam dimensi sosiokultural warga negara.
3. Manusia punya kecenderungan dan keinginan untuk terlibat secara sosial bisa menjadi bagian dari sebuah gerakan kebaikan, maka hal tersebut kekuatan filantropi masa depan untuk punya peran dan potensi yang cukup bagus untuk menggerakkan dan merekatkan kembali masyarakat. Oleh karena itu gerakan filantropi mampu untuk menguatkan dimensi sosiokultural kewarganegaraan warga negara Indonesia.

### **5.3. Rekomendasi**

Merujuk pada kesimpulan penelitian dan implikasi yang dihasilkan, penulis merekomendasikan beberapa hal kepada beberapa pihak yaitu pemerintah, lembaga filantropi, lembaga pendidikan, dan para peneliti, antara lain:

#### **1. Pemerintah**

- a. Realita bahwa keberadaan filantropi mengakar dalam kehidupan keseharian warga negara Indonesia memberikan peluang pemerintah untuk memelihara kearifan lokal masyarakat Indonesia dengan memberikan perhatian yang

lebih besar dengan regulasi yang memberikan peluang adanya gerakan-gerakan kebaikan.

- b. Realita bahwa filantropi menjadi jembatan antara warga negara dan negara, maka pemerintah perlu untuk memberikan kepastian regulasi yang jelas serta keringanan insentif pajak bagi gerakan filantropi.
- c. Realita bahwa gerakan filantropi dengan basis keagamaan cenderung eksklusif, maka pemerintah perlu untuk mengampanyekan filantropi inklusif bagi seluruh warga negara Indonesia untuk tujuan berkelanjutan.
- d. Realita bahwa gerakan pemerintah untuk membantu warga negara bukan merupakan gerakan filantropi, maka pemerintah memberikan peluang bagi warga negara dan sektor swasta untuk bersama-sama dengan pemerintah mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

## **2. Lembaga Filantropi**

- a. Lembaga filantropi perlu untuk lebih mengoordinasikan kegiatan filantropi secara inklusif dan merata untuk mendukung pemerintah dalam usaha memberikan keadilan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia.
- b. Akuntabilitas gerakan filantropi perlu dijaga untuk menjamin kepercayaan pemberi donor supaya mereka memberikan bantuan melalui lembaga yang akuntabel.
- c. Lembaga filantropi perlu untuk menjamin dan memastikan bahwa gerakan filantropi tidak mencapai antiklimaks dengan gerakannya karena Indonesia menempati peringkat pertama negara dengan kemurahan hati.

## **3. Lembaga Pendidikan**

- a. Lembaga pendidikan khususnya pendidikan tinggi perlu untuk serius mengkaji filantropi secara akademik dan keilmuan karena potensi besar dari gerakan filantropi, terutama dalam kajian pendidikan kewarganegaraan
- b. Pendidikan Kewarganegaraan di persekolahan perlu untuk membuat rumusan kurikulum untuk menginsersi gerakan filantropi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan melihat realita di masyarakat di samping kegiatan kurikuler di kelas.

#### **4. Peneliti**

Penelitian terkait filantropi ini hanya fokus pada tradisi, gerakan dan lembaga filantropi untuk dalam hubungannya dalam pengembangan dimensi kewarganegaraan. Penelitian ini melihat apakah filantropi berkontribusi terhadap pengembangan diskursus mengenai kewarganegaraan dalam dimensi sosiokultural dengan melihat relasi antara warga negara dengan negara dan filantropi itu sendiri. Penelitian ini tidak menyoroti dampak yang lebih luas dari filantropi itu untuk warga negara.